

**PENGARUH AMBIGUITAS PERAN, KONFLIK PERAN, DAN KELEBIHAN PERAN TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KOTA TOMOHON DAN KABUPATEN MINAHASA)**

Grill G. U. Pangkey<sup>1</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, Hendrik Gamaliel<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

<sup>1</sup>Email: ultranovgian@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the extent to which the role ambiguity, role conflict, and role overload affect the independence of local government internal auditors. The problem in this study, namely the indication of a lack of independence in the internal auditor of local government seen from the audit results are not detected by the inspectorate, but found by the external auditor of the audit board (The Audit Board of The Republic of Indonesia). The population of this study were all local government internal auditors in Tomohon city and Minahasa regency totaling 60 people. Samples in this study using sampling techniques from Isaac and Michael (1983) with an error rate of 1% and then determined 55 people as samples taken from the internal auditor Inspectorate of Tomohon city and Minahasa regency. The variables in this study are independent variables, namely role ambiguity ( $X_1$ ), role conflict ( $X_2$ ), and role overload ( $X_3$ ), while the dependent variable is the independence of local government internal auditors. The data of this study were taken from questionnaires distributed to respondents. The results of this study indicate that the ambiguity of the role has a significant negative effect on the independence of local government internal auditors, the role conflict does not have a significant effect on the independence of local government internal auditors, the overload of the role has a significant negative effect on the independence of local government internal auditors, as well as district.*

*Keywords: ambiguity, conflict, overload, role, independence, auditor, internal.*

**1. PENDAHULUAN**

Menurut Karianga (2017:40), *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi. Di Indonesia, *good governance* sudah mulai diterapkan sejak era reformasi. Dalam perkembangannya, penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya jika dilihat dari tujuan diterapkannya *good governance*. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti *good governance* gagal diterapkan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan *good governance* sehingga tata kelola baik manajemen maupun keuangan dapat sesuai dengan standar yang berlaku. Penerapan tata kelola manajemen dan keuangan yang sesuai dengan standar tentunya perlu ditopang dengan adanya audit internal. Audit internal dilakukan untuk memonitor kinerja manajemen. Menurut Saiyang et al. (2022:255), bagi individu monitor sangat bermanfaat karena akan mendapat masukan untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan

demikian, pengawasan dalam konteks reformasi birokrasi bermanfaat bagi kapasitas lembaga maupun kinerja individu.

Audit internal dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dalam melakukan pengawasan. Menurut Whittington et al. (2012), audit adalah pemeriksaan hasil laporan keuangan entitas atau perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Dengan mengamati, memeriksa dokumen dan aset, dan bertanya baik di dalam ataupun luar perusahaan serta melakukan prosedur audit, auditor akan mendapatkan data yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit.

Di Indonesia, auditor internal pemerintah disebut sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri atas: 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; 2) Inspektorat Jenderal (Itjen)/ Inspektorat Utama (Ittama)/ Inspektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); 3) Inspektorat Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; 4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, APIP dituntut untuk melakukan perilaku yang independen tanpa adanya gangguan dari orang lain sehingga hasil pengawasan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kenyataannya.

Kondisi lingkungan sosial dalam pekerjaan yang tidak memungkinkan atau kurang baik akan menimbulkan permasalahan dalam independensi seseorang. Permasalahan tersebut seperti adanya tekanan peran (*role stress*) yang dirasakan. Menurut Vanchapo (2020:37) tekanan peran adalah keadaan emosional yang timbul karena adanya ketidaksesuaian beban kerja dengan kemampuan individu untuk menghadapi tekanan-tekanan yang dihadapinya. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2020) menggunakan 3 unsur peran yang telah dikembangkan oleh, yaitu konflik peran (*role conflict*), ambiguitas peran (*role ambiguity*), dan kelebihan peran (*role overload*).

Konflik peran adalah suatu situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda (Robbins dan Judge, 2017:372). Ambiguitas peran yang juga disebut ketidakjelasan peran adalah tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban yang jelas dan hubungan lainnya (Lubis, 2017:105). Menurut Sutherland dan Cooper (1990), *role overload* atau kelebihan peran adalah jumlah yang harus kita lakukan, baik ini melibatkan kerja yang berlebihan, kebutuhan untuk bekerja dengan jam kerja yang paling panjang, *shift* kerja, dan mengelola orang lain.

Penelitian tentang konflik peran terhadap independensi yang diteliti oleh Yasa (2017), mengungkapkan bahwa konflik peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Bandiyono dan Ashri (2022), Salsabila (2020), Aprimulki (2017), Lesmana (2016), Nur et al. (2016), Hutami dan Chariri (2015), Jamaluddin (2014), Sindudisastra (2014), Agustina (2009), Fanani et al. (2008), Layn dan Atarmawan (2020) menunjukkan bahwa konflik peran berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen independensi dan kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Arief et al. (2018), Setiawan (2018), serta Gunawan dan Ramdan (2012), menyatakan bahwa konflik peran tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi.

Penelitian tentang hubungan ambiguitas peran terhadap independensi yang diteliti oleh Salsabila (2020) menyatakan bahwa ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Bandiyono dan Ashri

(2022), Nur et al. (2016), Hutami dan Chariri (2015), Jamaluddin (2014), Sindudisastra (2014), Ermawati et al. (2014), Agustina (2009) menunjukkan bahwa ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi dan kinerja.

Penelitian tentang hubungan kelebihan peran terhadap independensi dapat dilihat dari kinerja karyawan yang mana independensi merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Alasan digunakannya variabel kelebihan peran yaitu karena ketika seseorang dihadapkan dengan begitu banyak pekerjaan dan komitmen dalam satu waktu yang sempit dan tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan dalam menyelesaikannya dapat memengaruhi independensi seorang auditor. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang mengungkapkan bahwa kelebihan peran berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Salsabila (2020) dan Agustina (2009) menyatakan bahwa kelebihan peran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Layn dan Atarmawan (2020) menunjukkan bahwa kelebihan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Pada tahun 2021, masyarakat Desa Winebetan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa yang dipimpin oleh Frits Mentu melapor ke Kejaksaan Negeri Tondano mengenai adanya penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 oleh Hukum Tua Desa Winebetan. Berdasarkan pemeriksaan kembali dari Inspektorat Kabupaten Minahasa, kerugian yang ditemukan hanya sedikit di mana menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan perhitungan dari masyarakat sehingga menimbulkan anggapan bahwa adanya ketidakwajaran dibalik pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. (James, 2022)

Hasil pemeriksaan dari BPK RI pada laporan keuangan Kota Tomohon dari tahun 2004 sampai 2021 ditemukan bahwa adanya kerugian daerah yang timbul dari penggunaan anggaran yang berlebihan sehingga direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas daerah atau juga disebut tuntutan ganti rugi (TGR). Sesuai dengan catatan dari BPK RI, kerugian yang masih harus dikembalikan berjumlah Rp.27,1 Milyar atau masih 19% dari total yang telah dikembalikan (Laatung, 2021). Dimungkinkan bahwa pihak Inspektorat kurang menunjukkan sikap independen karena sudah 17 tahun tuntutan ganti rugi yang dievaluasi dan dimonitor oleh mereka tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ambiguitas peran, konflik peran, dan kelebihan peran berpengaruh terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *Stewardship theory*

Teori ini didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi, serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, yang mana *steward* (bawahan) termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan *principal* (pimpinan). Teori *stewardship* pertama dikembangkan oleh Davis *et al* (1997). Menurut Ghozali (2020:89), teori *stewardship* menyatakan bahwa *steward* akan berperilaku sosial yaitu perilaku di mana *steward* mengikuti keinginan *principal* atau perusahaan. Teori *stewardship* mengatakan bahwa dampak positif pada kinerja karena kedua pihak baik pihak *principal* maupun *steward* bekerja untuk mencapai tujuan yang sama (Ghozali, 2020:89).

*Stewardship theory* menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang pemimpin. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama bertindak sesuai dengan tindakan *principal* demi kepentingan bersama agar tercapai tujuan bersama. Hal penting dalam *stewardship theory* adalah pemimpin menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal*. Ketika *principal* memberi arahan yang salah atau tidak sesuai dengan peraturan organisasi atau perusahaan, maka *steward* harus mematuhi keinginan dari *principal* seperti

yang dikatakan oleh Ghozali (2020:89). Oleh karena itu, perilaku independen yang seharusnya dilakukan oleh *steward* dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, dipengaruhi oleh keinginan *principal* sehingga mau tidak mau *steward* harus mengikuti keinginan tersebut.

Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menguji perilaku independen seorang auditor atau *steward* ketika ada intervensi dari *principal* (jabatan yang lebih tinggi) dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mempengaruhi hasil kerjanya. Faktor situasional seperti konflik peran, ambiguitas peran, dan kelebihan peran dapat berpengaruh terhadap independensi seorang auditor jika arahan yang salah dari pimpinan harus diikuti oleh bawahannya.

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh Heider (1958:548). Teori atribusi merupakan pemaparan sebuah teori mengenai sikap suatu individu. Teori ini mendeskripsikan tentang proses penentuan sebab dan akibat perilaku suatu individu tertentu maupun perilaku orang lain. Teori ini juga membahas tentang hal-hal internal dan eksternal yang bisa menentukan perilaku seseorang. Hal-hal internal antara lain seperti sikap, sifat, dan karakter seseorang. Sedangkan hal-hal eksternal yaitu lingkungan atau situasi tertentu yang berdampak pada seseorang.

Gordon dan Graham (2006) menjelaskan situasi di sekitar yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* merupakan faktor internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situational attributions* merupakan faktor eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena untuk menjelaskan independensi auditor internal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Fokus teori atribusi ini yaitu untuk mengetahui sikap seseorang dengan mengambil kesimpulan dari perilakunya bahwa sikapnya telah berubah atau tidak. Dengan melihat sikap, perilaku, serta mental dari auditor internal dalam mempertahankan sikap independensi dapat dilihat dari *ability* (kemampuan), *effort* (upaya), *task difficulty* (kesulitan dalam pekerjaan), dan *luck* (keberuntungan). (Weiner, 1992)

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena untuk mengetahui faktor-faktor internal berupa ambiguitas peran, konflik peran dan kelebihan peran yang mempengaruhi auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dapat berpengaruh terhadap perilaku dan pekerjaan seseorang. Itu berarti bahwa faktor berupa ambiguitas peran, konflik peran, dan kelebihan peran dapat mempengaruhi perilaku independensi seorang auditor.

### **Ambiguitas Peran**

Menurut Lubis (2017:105), ketidakjelasan peran adalah tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban yang jelas dan hubungan lainnya. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2017:371), bahwa ambiguitas tercipta manakala ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang ia lakukan.

### **Konflik Peran**

Menurut Lubis (2017:86), konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh auditor yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan berpotensi menurunkan motivasi kerja. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2017:372) menyatakan bahwa konflik peran adalah suatu situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda.

### **Kelebihan Peran**

Menurut Sutherland dan Cooper (1990), *role overload* (kelebihan peran) adalah jumlah yang harus kita lakukan, baik ini melibatkan kerja yang berlebihan, kebutuhan untuk bekerja dengan jam kerja yang paling panjang, *shift* kerja, mengelola orang lain. Mondy et al. (1990) menyatakan bahwa *role overload* merupakan tipe konflik peran yang lebih kompleks, terjadi ketika harapan yang dikirimkan pada pemegang peran dapat digabungkan akan tetapi kinerja mereka melampaui jumlah waktu yang tersedia bagi orang yang melaksanakan aktivitas yang diharapkan.

### **Independensi**

Menurut Mulyadi (2014:26), independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga merupakan sifat dan sikap yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Ambiguitas Peran Terhadap Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah**

Dalam teori atribusi, perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain sikap, sifat dan karakter sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan atau situasi sekitar yang berdampak pada seseorang. Malone dan Robert (2009) mengatakan bahwa faktor penyebab tindakan pengurangan kualitas audit adalah faktor situasional saat melakukan audit serta faktor internal, yaitu sisi personalitas dan karakter pribadi auditor. Menurut Lubis (2017:105), ketidakjelasan peran adalah tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban yang jelas dan hubungan lainnya. Ambiguitas peran yang dialami seorang individu dapat didasari oleh beberapa faktor baik dari diri sendiri, rekan kerja, pimpinan, bawahan, maupun sarana dan prasarana di tempat kerja.

Penelitian tentang hubungan ambiguitas peran terhadap independensi yang diteliti oleh Salsabila (2020) menyatakan bahwa ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Bandiyono dan Ashri (2022), Nur et al. (2016), Hutami dan Chariri (2015), Jamaluddin (2014), Sindudisastra (2014), Ermawati et al. (2014), Agustina (2009) menunjukkan bahwa ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi dan kinerja.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.

#### **2. Pengaruh Konflik Peran Terhadap Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah**

Dalam teori atribusi, perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain sikap, sifat dan karakter sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan atau situasi sekitar yang berdampak pada seseorang. Malone dan Robert (2009) mengatakan bahwa faktor penyebab tindakan pengurangan kualitas audit adalah faktor situasional saat melakukan audit serta faktor internal, yaitu sisi personalitas dan karakter pribadi auditor. Menurut Lubis (2017:86), konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh auditor yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan berpotensi menurunkan motivasi kerja. Seorang individu yang memiliki dua peran atau lebih, akan memengaruhi hasil pekerjaannya karena tidak fokus pada satu peran saja sehingga pekerjaan yang dihasilkan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penelitian tentang konflik peran terhadap independensi yang diteliti oleh Yasa (2017), mengungkapkan bahwa konflik peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Bandiyono dan Ashri (2022), Salsabila (2020), Aprimulki (2017), Lesmana (2016), Nur et al. (2016), Hutami dan Chariri (2015), Jamaluddin

(2014), Sindudisastra (2014), Agustina (2009), Fanani et al. (2008), Layn dan Atarmawan (2020) menunjukkan bahwa konflik peran berpengaruh negatif signifikan terhadap komitmen independensi dan kinerja. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Konflik peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.

### 3. Pengaruh Kelebihan Peran Terhadap Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah

Dalam teori atribusi, perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain sikap, sifat dan karakter sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan atau situasi sekitar yang berdampak pada seseorang. Malone dan Robert (2009) mengatakan bahwa faktor penyebab tindakan pengurangan kualitas audit adalah faktor situasional saat melakukan audit serta faktor internal, yaitu sisi personalitas dan karakter pribadi auditor. Menurut Sutherland dan Cooper (1990), *role overload* (kelebihan peran) adalah jumlah yang harus kita lakukan, baik ini melibatkan kerja yang berlebihan, kebutuhan untuk bekerja dengan jam kerja yang paling panjang, *shift* kerja, mengelola orang lain. Penelitian tentang hubungan kelebihan peran terhadap independensi dapat dilihat dari kinerja karyawan yang mana independensi merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang mengungkapkan bahwa kelebihan peran berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Salsabila (2020) dan Agustina (2009) menyatakan bahwa kelebihan peran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kelebihan peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), yaitu menguji pengaruh variabel ambiguitas peran, konflik peran dan kelebihan peran terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah. Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang sesuai dengan jenis penelitian. Sumber data primer diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pemerintah daerah di kota Tomohon dan di kabupaten Minahasa. Total populasi yaitu 60 orang dengan rincian 26 orang auditor di inspektorat kota Tomohon dan 34 orang auditor di inspektorat kabupaten Minahasa. Responden diambil dari orang yang berpengalaman dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan (audit). Adapun responden tersebut terdiri dari auditor bersertifikat dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang tugas dan fungsinya hampir sama dengan auditor bersertifikat. Untuk menentukan ukuran jumlah sampel, menggunakan tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (1983). Jumlah sampel dari populasi 60 orang yang ditentukan dilihat berdasarkan tabel rumus penentuan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 1%, sehingga jumlah sampel ditentukan sebesar 55. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Inspektorat kota Tomohon dan kabupaten Minahasa.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Di provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota yang tersebar di Pulau Sulawesi dan daerah kepulauan. Setiap

Kabupaten dan Kota memiliki Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

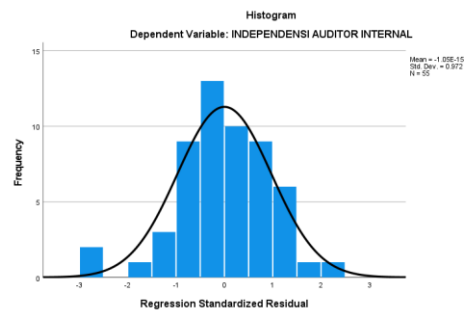
Uji statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2022:147). Pada variabel Ambiguitas Peran ( $X_1$ ) terdiri dari 6 item pernyataan. Para responden memiliki jawaban yang bervariasi berdasarkan penilaian dan pemahaman masing-masing terhadap butir pernyataan. Jumlah minimal jawaban yang diberikan oleh responden adalah 6 dan jumlah maksimal jawaban yang diberikan adalah 14 dengan rata-rata jawaban sebesar 11,13 serta standar deviasi sebesar 1,516. Pada variabel konflik peran ( $X_2$ ) terdiri dari 8 item pernyataan. Para responden memiliki jawaban yang bervariasi berdasarkan penilaian dan pemahaman masing-masing terhadap butir pernyataan. Jumlah minimal jawaban yang diberikan oleh responden adalah 8 dan jumlah maksimal jawaban yang diberikan adalah 20 dengan rata-rata jawaban sebesar 14,82 serta standar deviasi sebesar 2,749. Pada variabel kelebihan peran ( $X_3$ ) terdiri dari 9 item pernyataan. Para responden memiliki jawaban yang bervariasi berdasarkan penilaian dan pemahaman masing-masing terhadap butir pernyataan. Jumlah minimal jawaban yang diberikan oleh responden adalah 9 dan jumlah maksimal jawaban yang diberikan adalah 27 dengan rata-rata jawaban sebesar 17,42 serta standar deviasi sebesar 4,512. Pada variabel independensi auditor ( $Y$ ) terdiri dari 7 item pernyataan. Para responden memiliki jawaban yang bervariasi berdasarkan penilaian dan pemahaman masing-masing terhadap butir pernyataan. Jumlah minimal jawaban yang diberikan oleh responden adalah 26 dan jumlah maksimal jawaban yang diberikan adalah 35 dengan rata-rata jawaban sebesar 30,84 serta standar deviasi sebesar 2,551.

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2021:66). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel ambiguitas peran, konflik peran, kelebihan peran serta independensi auditor internal pemerintah daerah berdasarkan perbandingan  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$  mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari pada  $r_{tabel}$ . Berdasarkan nilai signifikansi juga menunjukkan bahwa variabel ambiguitas peran, konflik peran, kelebihan peran serta independensi auditor internal pemerintah daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Uji reliabilitas ini dilakukan berdasarkan konsistensi jawaban atas kuesioner. Menurut Ghozali (2021:61), uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Keandalan suatu kuesioner apabila jawaban terhadap pertanyaan itu stabil dari waktu ke waktu. Untuk menghitung reliabilitas, dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Menurut Ghozali (2021:62), instrumen untuk mengukur masing-masing variabel dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$ . Nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel ambiguitas peran sebesar 0,716, variabel konflik peran sebesar 0,792, variabel kelebihan peran sebesar 0,804, dan variabel independensi auditor sebesar 0,802. Dari hasil uji reliabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel karena mempunyai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$ .

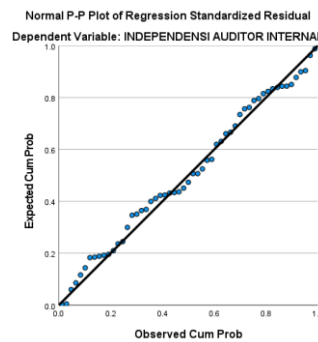
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021:196). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik yang andal dengan melihat histogram dan *normal probability plot*.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Histogram



Sumber: Data olahan, 2022

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik P-Plot



Sumber: Data olahan, 2022

Dengan melihat hasil dari gambar tersebut, maka data dianggap terdistribusi secara normal karena garis diagonal mengikuti grafik histogramnya dan membentuk lonceng terbalik. Serta terdistribusi normal karena pada grafik *probability plot*, titik-titik tersebar di garis diagonal dan tidak membentuk pola tertentu.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *varian inflation factor (VIF)*. Nilai *cut off* yang umum digunakan adalah nilai toleran 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. Ghozali (2021:157) menambahkan bahwa jika nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dapat dipercaya atau bebas multikolinearitas.

Tabel 1. Hasil Pengujian Multikolinearisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	40.948	2.123		19.289	<.001		
AMBIGUITAS PERAN	-.408	.202	-.242	-2.024	.048	.777	1.287
KONFLIK PERAN	.014	.124	.015	.111	.912	.646	1.548
KELEBIHAN PERAN	-.327	.070	-.561	-4.678	<.001	.777	1.288

a. Dependent Variable: INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL

Sumber: Data olahan, 2022

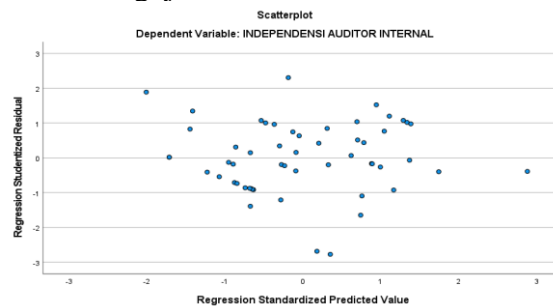
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen yakni ambiguitas peran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,777 dan nilai VIF sebesar 1,287, variabel konflik peran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,646 dan nilai VIF sebesar 1,548, serta variabel



kelebihan peran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,777 dan nilai VIF sebesar 1,288. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa seluruh nilai *tolerance* dari ketiga variabel independen dinyatakan bebas multikolinearitas atau dapat dipercaya karena nilai *tolerance* > 0,10. Begitu juga jika melihat nilai VIF dari ketiga variabel independen tersebut menunjukkan seluruh nilai VIF < 10 sehingga dapat dinyatakan bebas multikolinearitas atau dapat dipercaya

Ghozali (2021:178) menjelaskan bahwa tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian atau tidak, dilakukan dengan melihat grafik plot antara prediksi nilai variabel terikat dengan residualnya. Apabila residual plot yang terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada di atas serta di bawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Gambar 3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Berdasarkan *Scatter Plot*



Sumber: Data olahan, 2022

Hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan grafik *scatter plot* menunjukkan bahwa residual plot yang terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada di atas serta di bawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda dilakukan dalam rangka untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap satu variabel tetap (*dependent variable*) (Ghozali, 2021:145). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang timbul antara ambiguitas peran, konflik peran, dan kelebihan peran terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah. Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai statistik penelitian ini, akan dinilai *goodness of fit* dengan mengukur nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai F, dan nilai t.

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	40.948	2.123		19.289	<.001		
	AMBIGUITAS PERAN	-.408	.202	-.242	-2.024	.048	.777	1.287
	KONFLIK PERAN	.014	.124	.015	.111	.912	.646	1.548
	KELEBIHAN PERAN	-.327	.070	-.561	-4.678	<.001	.777	1.288

a. Dependent Variable: INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL

Sumber: Data olahan, 2022

Model persamaan regresi linear berganda yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

$$Y = 40,948 - 0,408X_1 + 0,014X_2 - 0,327X_3 + e$$

Nilai konstanta adalah sebesar 40,948 dengan nilai positif. Hal tersebut berarti bahwa apabila ketiga variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata nilai independensi auditor internal pemerintah daerah adalah 40,948. Nilai koefisien regresi variabel ambiguitas peran ( $X_1$ ) sebesar -0,408. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan ambiguitas peran mengalami kenaikan 1%, maka independensi auditor internal pemerintah daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,408. Koefisien bernilai -0,408 artinya terjadi hubungan negatif antara ambiguitas peran dengan independensi auditor internal pemerintah daerah. Semakin turun ambiguitas peran, maka independensi auditor internal akan meningkat. Sebaliknya, semakin naik ambiguitas peran, maka independensi auditor internal akan menurun. Nilai koefisien regresi variabel konflik peran ( $X_2$ ) sebesar 0,14. Jika dilihat dari nilai signifikan, yaitu 0,912 berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara konflik peran terhadap independensi auditor internal karena nilai signifikansinya jauh di atas 0,05. Nilai koefisien regresi variabel kelebihan peran ( $X_3$ ) sebesar -0,327. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kelebihan peran mengalami kenaikan 1%, maka independensi auditor internal pemerintah daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,327. Koefisien bernilai 0,327 artinya terjadi hubungan negatif antara kelebihan peran dengan independensi auditor internal pemerintah daerah. Semakin turun kelebihan peran, maka independensi auditor internal akan meningkat. Sebaliknya, semakin naik kelebihan peran, maka independensi auditor internal akan menurun.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melakukan prediksi seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini adalah nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ).

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi Simultan Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 <sup>a</sup>	.431	.398	1.980

a. Predictors: (Constant), KELEBIHAN PERAN, AMBIGUITAS PERAN, KONFLIK PERAN

b. Dependent Variable: INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL

Sumber: Data olahan, 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) adalah 0,398 atau 39,8%. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel ambiguitas peran, variabel konflik peran, dan variabel kelebihan peran dalam menjelaskan variabel dependen yaitu independensi auditor internal sebesar 39,8%. Sebanyak 60,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Menurut Ghozali (2021:98), nilai F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk menguji secara simultan dilakukan dengan analisis masing-masing regresi.

Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik F

		ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	174.166	3	58.055	12.550	<.001 <sup>b</sup>	
	Residual	194.291	42	4.626			
	Total	368.457	45				

a. Dependent Variable: INDEPENDENSI AUDITOR

b. Predictors: (Constant), KELEBIHAN PERAN, AMBIGUITAS PERAN, KONFLIK PERAN

Sumber: Data olahan, 2022

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Atau jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Diperoleh  $F_{tabel} = F(k; n-k) = F(3; 46-3) = F(3;43) = 2,783$ . Dalam perhitungan, diperoleh  $F_{hitung}$  lebih besar dari pada  $F_{tabel}$  yaitu  $12,882 > 2,783$  sehingga  $H_0$  ditolak. Sedangkan jika dilihat dari nilai signifikansi hitung adalah  $< 0,001$  yang berarti  $< 0,05$ , maka keputusannya juga menolak  $H_0$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif signifikan ambiguitas peran, konflik peran, dan kelebihan peran terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.

Uji statistik t dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian statistik t ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Jika nilai statistik  $t_{hitung}$  lebih tinggi dari pada nilai  $t_{tabel}$ , maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2021:179).

Tabel 5. Hasil Pengujian Statistik t

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	40.948	2.123		19.289	<.001			
AMBIGUITAS PERAN	-.408	.202	-.242	-2.024	.048	.777	1.287	
KONFLIK PERAN	.014	.124	.015	.111	.912	.646	1.548	
KELEBIHAN PERAN	-.327	.070	-.561	-4.678	<.001	.777	1.288	

a. Dependent Variable: INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL

Sumber: Data olahan, 2022

Uji Hipotesis 1:

Variabel ambiguitas peran memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,048 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki  $t_{hitung} -2,024 < 2,007 (t_{tabel})$ . Hasil ini menunjukkan bahwa ambiguitas peran terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor internal. Selain itu, nilai t variabel ambiguitas peran yang memiliki nilai negatif yaitu -2,024 yang menunjukkan bahwa ambiguitas peran memiliki pengaruh yang arahnya negatif terhadap independensi auditor internal. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Uji Hipotesis 2:

Variabel konflik peran memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,912 yang lebih besar dari 0,05 dan memiliki  $t_{hitung} 0,111 < 2,007 (t_{tabel})$ . Hasil ini menunjukkan bahwa konflik peran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor internal. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.

Uji Hipotesis 3:

Variabel kelebihan peran memiliki tingkat signifikansi sebesar  $< 0,001$  yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan memiliki  $t_{hitung} -4,678 < 2,007 (t_{tabel})$ . Hasil ini menunjukkan bahwa

kelebihan peran terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor internal. Selain itu, nilai  $t$  variabel kelebihan peran yang memiliki nilai yaitu  $-4,678$  menunjukkan bahwa kelebihan peran memiliki pengaruh yang arahnya negatif terhadap independensi auditor internal. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

#### **4.2 Pembahasan**

Ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari uji  $t$  yang dilakukan. Variabel ambiguitas peran memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,048$  yang lebih kecil dari  $0,05$  dan memiliki  $t_{hitung} -2,024 < 2,007$  ( $t_{tabel}$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa ambiguitas peran terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor internal. Dengan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah atau  $H_1$  diterima. Hasil penelitian ini tentu sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salsabila (2020) yang menyatakan bahwa ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Bandiyono dan Ashri (2022), Nur et al. (2016), Hutami dan Chariri (2015), Jamaluddin (2014), Sindudisastra (2014), Ermawati et al. (2014), Agustina (2009) menunjukkan bahwa ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi dan kinerja.

Konflik peran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari uji  $t$  yang dilakukan. Variabel konflik peran memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,912$  yang lebih besar dari  $0,05$  dan memiliki  $t_{hitung} 0,111 < 2,007$  ( $t_{tabel}$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa konflik peran memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap independensi auditor internal. Dengan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa konflik peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah atau  $H_2$  ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Hasil pengujian hipotesis ini ditemukan bahwa kegiatan pengawasan telah menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh auditor sehingga masing-masing auditor telah mengetahui peran dan fungsinya pada saat bertugas. Ketika menerima pekerjaan dari 2 atau lebih atasan yang berbeda, para auditor akan memilah mana pekerjaan yang diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan tingkat kesulitan dan waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, para auditor dapat terhindar dari adanya konflik peran. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pernyataan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi yang dapat memengaruhi independensinya. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa konflik peran berpengaruh tidak signifikan terhadap independensi. Arief et al. (2018) serta Gunawan dan Ramdan (2012) juga menyatakan bahwa konflik peran berpengaruh tidak signifikan terhadap independensi.

Kelebihan peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari uji  $t$  yang dilakukan. Variabel kelebihan peran memiliki tingkat signifikansi sebesar  $< 0,001$  yang berarti lebih kecil dari  $0,05$  dan memiliki  $t_{hitung} -4,678 < 2,007$  ( $t_{tabel}$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa kelebihan peran terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor internal. Dengan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa kelebihan peran berpengaruh negatif

signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah atau H<sub>3</sub> diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang mengungkapkan bahwa kelebihan peran berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Salsabila (2020) dan Agustina (2009) menyatakan bahwa kelebihan peran berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ambiguitas peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.
2. Konflik peran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.
3. Kelebihan peran berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.
4. Ambiguitas peran, konflik peran dan kelebihan peran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mengkaji kembali mengenai pengaruh konflik peran pada objek penelitian yang berbeda untuk melihat apakah konflik peran dapat mempengaruhi independensi auditor atau tidak. Diharapkan juga agar kembali melakukan penelitian mengenai variabel yang diduga dapat memengaruhi independensi auditor internal pemerintah yang tidak digunakan pada penelitian ini. Bagi pimpinan kantor Inspektorat di tempat penelitian agar dapat memperhatikan dan terus menekan tingkat ambiguitas peran dan kelebihan peran dalam diri auditornya. Bagi peneliti selanjutnya agar memperluas daerah penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, L. (2009). Pengaruh Konflik Peran, Ketidajelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian Pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta). *Jurnal Akuntansi* 1(1), 40-69.
- Aprimulki, E. (2017). Pengaruh Konflik Peran, Kelebihan Peran, Independensi, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *JOM Fekon*, 4(1), 3124-3138.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/15712/0>
- Arief, I., Su'un, M., dan Djunaid, A. (2018). Pengaruh Kedudukan Kelembagaan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran Terhadap Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Budaya Lokal Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Management & Business*, 1(2), 128-155.
- Bandiyono, A. & Ashri, M. B. A. (2022). Ambiguity, Role Conflict Towards Independence Commitment with Competence Mediation and Religiosity Moderation. *Jurnal Akuntansi*. 26(1), 109-126.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.

- Ermawati, M. D. Sinarwati, N. K. &Sujana, E. (2014).Pengaruh Role Stress terhadap Kinerja Auditor dengan Emotional Quotient sebagai variabel moderasi.*JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 1-12.
- Fanani, Z. Hanif, A. H. &Subroto, B. (2008).Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor.*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2).139-155.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26, Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Semarang: Yoga Pratama.
- Gordon S.,& Graham S. (2006). Epidemiology of Respiratory Disease in Malawi.*Medical Journal*, 18(3), 134-146.
- Gunawan, H. &Ramdan, Z. (2012).Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Kelebihan Peran dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor di KAP Wilayah DKI Jakarta. *Binus Business Review*, 3(2), 825-839.
- Heider, F. (1958).The Psychology of Interpersonal Relation. New York: Wiley.
- Hutami, G. (2015). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang).Skripsi. Universitas Diponegoro
- Jamaluddin.S. (2014).Ambiguitas Dan Konflik Peran Serta Independensi Sebagai Determinan Kualitas Audit Internal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 421-431.
- James. (2022). Terkait Tudingan Main Mata Perkecil Kerugian Negara, Kejari Minahasa Siap Tempuh Jalur Hukum.Berita Regional Sulut. Pedoman Rakyat.  
<https://pedomanrakyat.co.id/2022/05/09/terkait-tudingan-main-mata-perkecil-kerugian-negara-kejari-minahasa-siap-tempuh-jalur-hukum/>
- Karianga.H. (2017).Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum Dan Pilitik. Depok: Kencana.
- Laatung, J. (2021). Puluhan oknum PNS Tomohon Terlilit TGR Ada Pejabat Eselon 3 Hingga Kepala Dinas Lho.Redaksi Manado Post.  
<https://www.google.co.id/amp/s/manadopost.jawapos.com/minahasa-roya/tomohon/18/06/2021/puluhan-oknum-pns-tomohon-terlilit-tgr-ada-pejabat-eselon-3-hingga-kepala-dinas-lho/amp/>
- Layn, Y. Y., &Atarmawan R. J. D. (2020).The Influence of Role Conflict, Role Ambiguity and Role Overload on Auditor Performance (Empirical Study at the BPK Representative Office of the Republic of Indonesia in Maluku Province).*IC-SMART, Research Synergy Foundation*, 1(1), 49-57.
- Lesmana.(2017). Analisis Tiga Faktor Yang Memengaruhi Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.Skripsi.Universitas Hasanuddin Makassar.
- Lubis, A. I. (2017). Akuntansi Kepriilakuhan Akuntansi Multiparadigma. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Malone, C. F., &Roberts, R. W. (1996).Factors Associated With The Incidence of Reduce Audit Quality Behaviors.*Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 15(2), 49-64.
- Mondy, R. W., Noe, R. M. & Premeaux, S. R. (1990).Human Resource Management.Boson: Allyn and Bacon.
- Mulyadi.(2014). Auditing. Edisi 6.Cetakan 12.Jakarta: Salemba Empat.
- Nur, I. R., Hidayati, T. & Maria, S. (2016). Pengaruh Konflik Peran, Ambiguitas Peran dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.*Jurnal Manajemen*, 8(1), 1-18.
- Robbins, S. P. dan Judge, T. A. (2017).Organizational Behaviour. Edisi 13, Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.

- Saiyang, J. B., Ilat, V. & Manossoh, H. (2022). Analisis Kinerja Pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Setelah Penerapan Sistem Elektronik Kinerja (e-KIN). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 13(2), 248-260.
- Sindudisastra, L. K. (2014). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal. *Jurnal Modus* 26(1), 51-61.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2017. Ditama Binbangkum BPK RI.
- Salsabila.(2020). Pengaruh Role Ambiguity, Role Conflict, dan Role Overload Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Setiawan, T. H. (2018). Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Role Overload Terhadap Kinerja Akuntan Publik Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Pemoderasi. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono.(2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Vanchapo, A. R. (2020). Beban Kerja Dan Stres Kerja. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Weiner, B. (1992). Human Motivation: Metaphors, Theories, and Research. California: Sage Publication.
- Whittington, R., and Pany, K. (2012). Principle of Auditing and Other Assurance Service. 18<sup>th</sup> Edition, New York: Mc-Graw-Hill.
- Yasa, I. W. (2017). Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Mediasi Stres Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Bali. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 38-57.